



RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Tanah Laut dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019.

Rencana Kerja DISKOMINFO ini disusun berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) DISKOMINFO Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, dan mengacu kepada RKPD Kab. Tanah Laut Tahun 2019, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen DISKOMINFO dalam mewujudkan Visi dan Misi organisasi yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan oleh masing-masing komponen organisasi dapat berlangsung dalam proses sinergis, integralistik, koordinatif, dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang sama.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Renja Kerja DISKOMINFO Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Demikian disampaikan, semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat.

Pelaihari, Juli 2018

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut,



Dra. Hj. INDAH HERLINA
NIP. 19671004 199010 2 002

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	6
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	21
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III	23
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	23
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	23
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD	24
3.3. Program dan Kegiatan	25
BAB IV	34
PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (tahun berjalan)*	11
Tabel 2.2 Data Indikator Pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informasi	24
Tabel 2.3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019	26
Tabel 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN TANAH LAUT	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi informasi telah membawa bangsa Indonesia memasuki gerbang peradaban informasi, banyak perubahan mendasar dan membawa dampak yang luas di bidang politik, ekonomi dan sosial yang harus dihadapi dengan arif dan hati-hati. Adalah merupakan tantangan yang besar saat bangsa Indonesia berbenah diri dari keterpurukan untuk membangun Indonesia baru, pada saat itu pula harus memasuki era informasi. Untuk itu di perlukan suatu strategi komunikasi global untuk menghadapinya.

Pada saat ini Pemerintah Daerah Tanah Laut sedang bergerak cepat dalam melakukan implementasi Teknologi Informasi untuk memperbaiki kinerja manajemen pemerintahan, atau sering disebut sebagai E-Government. Tantangan besar dalam implementasi E-Government terletak pada proses penyeimbangan pencapaian hasil jangka pendek sekaligus fokus pada wawasan strategis di masa depan. Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan Teknologi Informasi di Daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2024. DISKOMINFO Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu Perangkat Kerja Daerah telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi DISKOMINFO Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 yaitu **"Mewujudkan Kabupaten Tanah Laut Yang Informatif Berbasis Teknologi Informasi"**,

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi tersebut, maka dibuatlah misi DISKOMINFO Tanah Laut sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan bidang informasi dan komunikasi kepada masyarakat serta promosi potensi daerah guna mendukung dinamika

- ekonomi;
2. Pemberdayaan teknologi informatika dengan bijak dan dinamis dalam menunjang pembangunan;
 3. Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat dalam upaya mendukung pengembangan potensi lokal.

Rencana Kerja (Renja) DISKOMINFO Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra DISKOMINFO Tahun 2019-2024 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja DISKOMINFO Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan DISKOMINFO Kabupaten Tanah Laut tahun 2019, yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta memperhatikan pula program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah dirubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLRI Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Renja DISKOMINFO Tahun 2019 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2019.

Tujuan penyusunan Renja DISKOMINFO Tahun 2019 adalah sebagai acuan DISKOMINFO dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi jangka menengah daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.4 Sistematika Penulisan

Substansi Rancangan Renja DISKOMINFO Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD; Analisis Kinerja Pelayanan SKPD; Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional; Tujuan dan Sasaran Renja SKPD; serta program dan kegiatan.

BAB IV Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terbentuk pada Tahun 2017 berdasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
2. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Kominfo dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi), dan masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis serta penetapan indikator sasaran strategis yang belum dilengkapi dengan ketersediaan sumber data, sehingga menyebabkan tidak terukurnya indikator.

Berikut ini disajikan realisasi Renja Dinas Kominfo Kabupaten Tahun 2017 dan realisasi Renja Tahun Berjalan 2018 dalam tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo dan Pencapaian Renstra SKPD.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian
Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (tahun berjalan)*

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018 (Tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
2	10				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	10	01			Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika									
2	10	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%							
2	10	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik yang terbayarkan	12 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
						Jumlah tagihan air yang terbayar	12 bln	0 bln	12 bln	0 bln	0	0 bln	0	0

						Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar	12 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
						Jumlah tagihan telepon yang terbayar	12 bln	0 bln	12 bln	0 bln	0	0 bln	0	0
2	10	01	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terbayarkan	12 bln	0 bln	12 bln	0 bln	0	12 bln	12	100
						Jumlah honorarium Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Komputer	6 bln	0 bln	6 bln	6 bln	100	0 bln	6	100
						Jumlah belanja cetak dan penggandaan yang terbayar	12 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	0 bln	12	100
						Jumlah belanja modal pengadaan personal komputer yang terbayar	6 unit	0 unit	6 unit	6 unit	100	0 unit	6	100
2	10	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah belanja pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
2	10	01	01	07	penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan	12 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
						Jumlah belanja materai yang terbayar	12 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	0 bln	12	100
						Jumlah honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT)	12 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	0 bln	12	100
2	10	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang terbayarkan	12 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
						Jumlah belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	0 bln	12	100
2	10	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang terbayar	12 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	0 bln	12	100

2	10	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbayarkan	12 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
2	10	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbayarkan	12 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
2	10	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terbayarkan	12 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
						Jumlah belanja alat listrik dan elektronik yang terbayar	12 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	0 bln	12	100
						Jumlah belanja pembuatan spanduk	30 buah	0 buah	30 buah	30 buah	100	0 buah	30	100
						Jumlah belanja modal lemari besi, locker 5 laci dan rak besi yang terbayar	14 buah	0 buah	14 buah	14 buah	100	0 buah	14	100
						Jumlah belanja modal pengadaan laptop dan printer yang terbayar	10 buah	0 buah	10 buah	10 buah	100	0 buah	10	100
						Jumlah pengadaan personal komputer yang terbayar	1 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100	0 unit	1	100
						Jumlah belanja modal pengadaan kursi tunggu yang terbayar	2 set	0 set	2 set	2 set	100	0 set	2	100
2	10	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah belanja makanan dan minuman untuk rapat dan tamu yang terbayarkan	12 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
2	10	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah belanja rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terbayarkan	12 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100
2	10	01	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah yang terbayarkan	12 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12	100

2	10	01	01	20	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Jumlah belanja jasa penunjang kinerja SKPD yang terbayarkan	12 bln	0 bln	0 bln	0 bln	0	12 bln	12	100
2	10				Urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	10	01			Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika									
2	10	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %							
2	10	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah belanja kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal yang terbayarkan	13 orang	0 orang	10 orang	3 orang	30	3 orang	6	46,2
2	10				Urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	10	01			Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika									
2	10	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %							
2	10	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan bulanan	12 buah	0 buah	12 buah	12 buah	100	12 buah	12	100
						Jumlah laporan triwulan	4 buah	0 buah	4 buah	4 buah	100	4 buah	4	100
						Jumlah laporan akhir tahun	1 buah	0 buah	1 buah	1 buah	100	1 buah	1	100
						Jumlah belanja alat tulis kantor yang terbayarkan	12 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	0 bln	12	100
						Jumlah belanja penjiwaan yang terbayarkan	82 buah	0 buah	82 buah	82 buah	100	0 buah	82	100

						Jumlah belanja makanan dan minuman rapat yang terbayarkan	40 ok	0 ok	40 ok	40 ok	100	0 ok	40	100
2	10					Urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2	10	01				Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika								
2	10	01	15			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase pemenuhan pengembangan data dan informasi daerah	100 %						
2	10	01	15	05		Penyusunan profil daerah	Jumlah Laporan Data Statistik (Profil Hasil Pembangunan)	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	1 100
							Jumlah tim pengelola data SIPD yang terbentuk	1 tim	0 tim	0 tim	0 tim	0	0 tim	0 0
							Jumlah laporan SIPD yang tersusun	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0 0
2	10					Urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2	10	01				Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika								
2	10	01	15			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase SKPD yang terintegrasi dalam jaringan TIK, Persentase peningkatan pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi publik, Persentase SKPD dengan sistem data yang terintegrasi berbasis aplikasi	100 %						
2	10	01	15	01		Kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah belanja pengelolaan Jaringan Internet untuk e-government	12 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 100

						Jumlah pemeliharaan layanan data, infrastruktur dan jaringan	12 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12	100
						Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pusat kendali Tuntung Pandang	12 bulan	0 bulan	0 bulan	0 bulan	0	12 bulan	12	100
						Jumlah pemeliharaan CCTV Digital Security System	12 bulan	0 bulan	0 bulan	0 bulan	0	12 bulan	12	100
						Jumlah belanja BBM dan service mesin genset yang terbayarkan	12 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	100	0 bulan	12	100
						Jumlah belanja langganan bandwidth internet dan layanan data (dedicated server)	1 tahun	0 tahun	1 tahun	1 tahun	100	0 tahun	1	100
						Jumlah belanja tenaga ahli pengisian konten berkala website dan tenaga ahli teknis lainnya yang terbayarkan	12 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	100	0 bulan	12	100
						Jumlah belanja pemeliharaan infrastruktur dan jaringan yang terbayarkan	12 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	100	0 bulan	12	100
						Jumlah belanja modal perangkat hotspot yang terbayarkan	7 titik hotspot	0 titik hotspot	7 titik hotspot	7 titik hotspot	100	0 titik hotspot	7	100
2	10	01	15	02	Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah belanja kegiatan operasional LPPL Radio Tuntung Pandang yang terbayar	12 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12	100
						Jumlah honorarium untuk operasional Radio Tuntung Pandang	12 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	100	0 bulan	12	100

						Jumlah peliputan berita radio Tuntung Pandang	300 peliputan	0 peliputan	300 peliputan	300 peliputan	100	300 peliputan	300	100
						Jumlah belanja pemeliharaan antena pemancar radio Tuntung Pandang	12 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	100	0 bulan	12	100
2	10	01	15	03	Kegiatan penyusunan aplikasi sistem informasi	Jumlah belanja perencanaan dan pengembangan aplikasi daerah	12 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12	100
						Jumlah dokumen perencanaan aplikasi penunjang e-government	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	0 dokumen	1	100
						Jumlah aplikasi penunjang E-Government	2 aplikasi	0 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	100	0 aplikasi	2	100
-	-	-	-	-	Inventarisasi data informasi	Jumlah pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat	- -	-	-	-	-	- -	-	-
2	10				Urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	10	01			Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika									
-	-	-	-		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi	-							
-	-	-	-	-	Penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah	Jumlah sosialisasi tentang kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah	- -	-	-	-	-	- -	-	-
2	10				Urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	10	01			Bidang Urusan Komunikasi									

					dan Informatika									
2	10	01	18		Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Persentase pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam pengelolaan informasi	100 %							
2	10	01	18	03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah Kegiatan Sosialisasi KIM yang terlaksana	1 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0	1 kegiatan	1	100
						Jumlah Tim PPID yang terbentuk	1 tim	0 tim	1 tim	1 tim	100	1 tim	1	100
						Jumlah informasi melalui majalah yang tersebar	1 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0	1 kegiatan	1	100
						Jumlah honorarium tim PPID yang terbayarkan	10 bulan	0 bulan	10 bulan	10 bulan	100	0 bulan	10	100
						Jumlah kegiatan pameran yang diikuti	1 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1	100
						Jumlah sosialisasi PPID yang terlaksana	1 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	0 kegiatan	1	100
						Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang terbina	11 KIM	0 KIM	6 KIM	6 KIM	100	5 KIM	11	100,0
-	-	-	-	-	Kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah informasi pembangunan daerah yang tersebar	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	Kegiatan keikutsertaan pameran	Jumlah pameran yang diikuti	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	Penyediaan dan pengembangan media informasi	Jumlah media informasi yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-
2	10				Urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar									

2	10	01			Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika											
2	10	01	18		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase pemenuhan pengelolaan aset daerah	100 %									
2	10	01	18	01	Penyusunan tabulasi data aset tetap	Jumlah laporan semester	2 doku men	0 doku men	2 doku men	2 doku men	100	2 doku men	2	100		
						Jumlah laporan triwulan	4 doku men	0 doku men	4 doku men	4 doku men	100	4 doku men	4	100		
						Jumlah laporan akhir tahun yang tersusun	1 doku men	0 doku men	1 doku men	1 doku men	100	0 doku men	1	100		
2	10				Urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar											
2	10	01			Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika											
2	10	01	20		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Kominfo	Persentase pelayanan pengelolaan komunikasi publik	100 %									
2	10	01	20	01	Kegiatan pemeliharaan menara repeater bidang kominfo	Jumlah Data menara telekomunikasi yang terhimpun	1 doku men	0 doku men	1 doku men	1 doku men	100	1 buah	1	100		
						Jumlah pemeliharaan izin frekuensi radio komunikasi ke Kemenkominfo	2 buah	0 buah	2 buah	2 buah	100	2 buah	2	100		
						Jumlah tim pengendali menara telekomunikasi	1 tim	0 tim	1 tim	1 tim	100	0 tim	1	100		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Penyelenggaraan pelayanan DISKOMINFO Kabupaten Tanah Laut sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang komunikasi, telekomunikasi serta telematika dan pengelolaan data elektronik, yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 77 Tahun 2016 dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Kepala Dinas

a. Tugas Kepala Dinas :

- 1) Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 2) Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi Dinas;
- 3) Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi dan informatika dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- 4) Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- 5) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis komunikasi;
- 6) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan E-Government;
- 7) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis statistik dan persandian;
- 8) Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan ;
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Fungsi Kepala Dinas :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas;
- 5) Pembinaan UPT Dinas; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

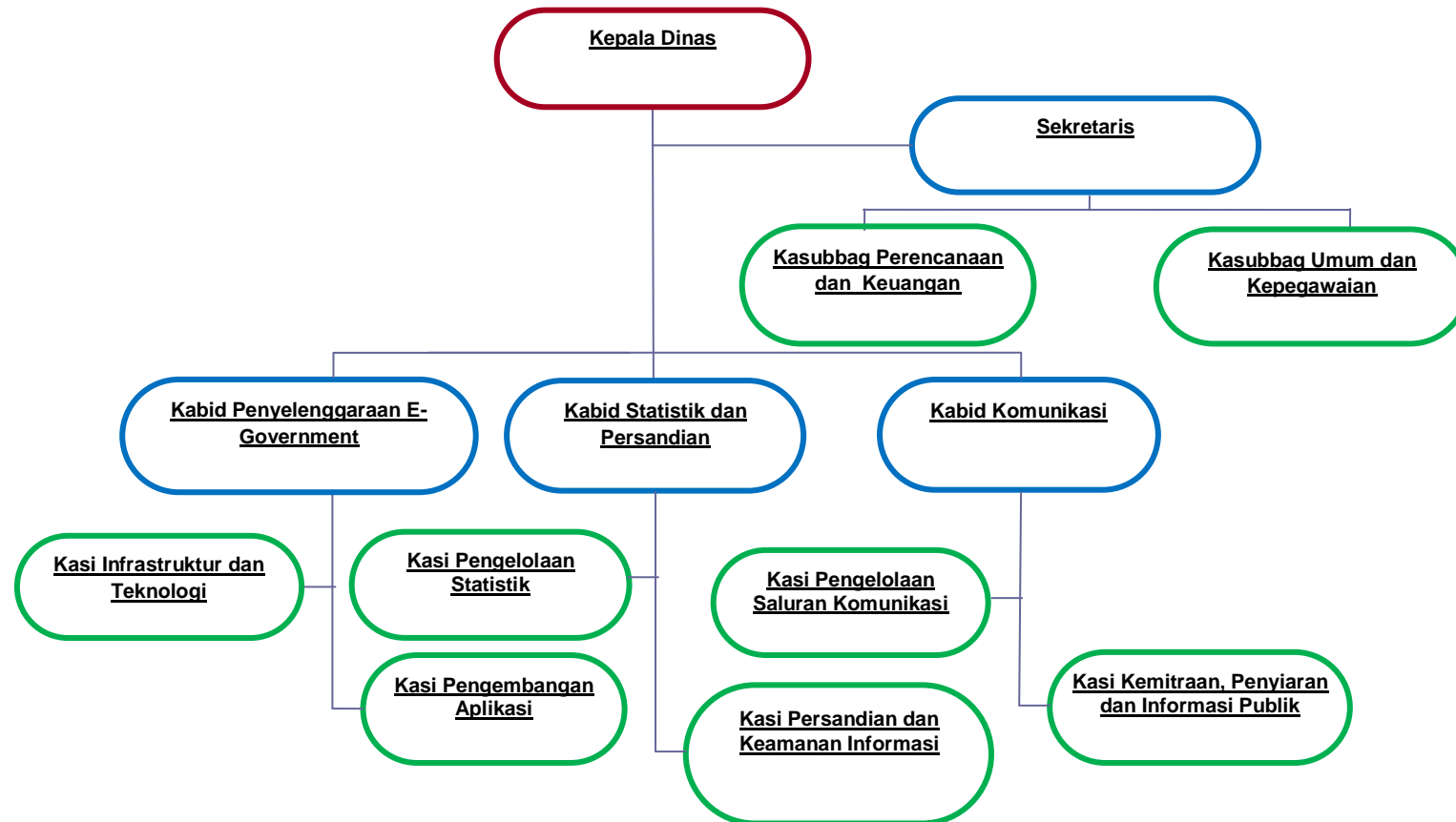
Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DISKOMINFO adalah urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.

Sebagaimana diatur Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Laut, terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Sub bagian, 3 (tiga) Bidang, 6 (enam) Seksi, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari;

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Komunikasi membawahi :
 1. Seksi Pengelola Saluran Komunikasi Publik
 2. Seksi Kemitraan Penyiaran dan Komunikasi Publik
- d. Bidang Penyelenggaraan E-Government membawahi:
 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 2. Seksi Pengembangan Aplikasi.
- e. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi;
 1. Seksi Pengelolaan Statistik;
 2. Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 77 Tahun 2016 sebagai berikut:



Keadaan Pegawai DISKOMINFO Kab. Tanah Laut berdasarkan jumlah pada bulan Januari 2018:

No	Status	Jumlah
1	PNS	22
2	CPNS	-
3	PTT	15
Jumlah		37

Pencapaian kinerja pelayanan DISKOMINFO Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat dari pencapaian Indikator kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut yang dikaitkan dengan target dalam Renstra DISKOMINFO.

Tabel 2.2

Data Indikator Pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informasi

No	Indikator	Standar Pelayanan Minimal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Media komunikasi dan informasi publik	Layanan jaringan komunikasi publik	Jumlah media komunikasi dan informasi publik yang dikelola SKPD	3 Media	5 Media	5 Media	5 Media	3 Media	5 Media	5 Media	5 Media
2	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif	Layanan jaringan komunikasi publik	Jumlah Kelompok Informasi (KIM) Aktif	6 KIM	5 KIM	11 KIM	11 KIM	6 KIM	5 KIM	11 KIM	11 KIM
3	SKPD yang terintegrasi dalam jaringan TIK	Meningkatnya layanan pengelolaan E-Government	Jumlah kerja sama dengan instansi terkait tentang pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan teknologi	5 SKPD	8 SKPD	10 SKPD	10 SKPD	5 SKPD	8 SKPD	10 SKPD	10 SKPD
4	Persentase SKPD dengan sistem data yang terintegrasi berbasis aplikasi	Meningkatnya layanan pengelolaan E-Government	Jumlah aplikasi dan jaringan SKPD	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi
3	SKPD yang terintegrasi dalam pusat data	Meningkatnya layanan pengelolaan sumber daya statistik dan persandian	Jumlah kerjasama dengan instansi terkait tentang pengelolaan data statistik terpadu Kabupaten Tanah Laut	0 SKPD	12 SKPD	24 SKPD	36 SKPD	0 SKPD	12 SKPD	24 SKPD	36 SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pelaksanaan peran DISKOMINFO sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal lembaga maupun secara eksternal, antara lain:

1. Pemanfaatan Teknologi informatika (e-government) dalam penyelenggaraan pemerintahan belum optimal.
2. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DISKOMINFO dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain :

- 1) Perbaikan berbagai sarana dan prasarana komunikasi dan media massa mulai dari pusat sampai ke daerah pedesaan sehingga akan mendukung pemerataan distribusi informasi.
- 2) Peningkatan peranan telekomunikasi serta media massa melalui pemberdayaan sehingga terjalinnya kerjasama dan keterpaduan langkah dalam penyediaan informasi.
- 3) Pembentukan pusat-pusat informasi yang dibutuhkan masyarakat serta pemberdayaan kelompok informasi yang tumbuh dari bawah akan sangat membantu makin meratanya pemahaman dan wawasan masyarakat terhadap informasi pembangunan.
- 4) Perbaikan sistem pengelolaan informasi pembangunan dan penyebarannya melalui pemberdayaan teknologi informasi sehingga terwujud pemerintahan yang berbasis informasi (e-government).

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut melakukan penelaahan dan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan musrenbang Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 untuk prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 tidak ada program atau kegiatan yang diusulkan (nihil) pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut. Adapun usulan program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.4 Usulan program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kabupaten Tanah Laut

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu *Techno Economy*, teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan. Akibat dari kondisi tersebut, salah satu kekuatan bangsa dapat pula diukur dari kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing. Pembangunan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia, yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) menentukan tingkat efektifitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumber daya baru yang lebih bernilai.

Dengan demikian peningkatan kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan bangsa dan negara, serta kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi melalui Sistem Informasi sangatlah penting. Khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi yang harmonis dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik- baiknya, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tanah Laut berupaya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan seimbang

melalui kegiatan dan tugas pokok dan fungsinya.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2017, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DISKOMINFO yang dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja Renstra DISKOMINFO, dalam rangka memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari misi yang telah dirumuskan sehingga dapat menggambarkan secara spesifik indikator kinerja keberhasilan, maka dari setiap misi ditetapkan tujuan dan sasaran Renja DISKOMINFO Tahun 2018.

Adapun tujuan dan sasaran dari ke-3 (tiga) misi DISKOMINFO Kabupaten Tanah Laut tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Misi 1** : Melaksanakan pelayanan jaringan komunikasi publik kepada masyarakat serta promosi potensi daerah guna mendukung dinamika ekonomi.

Tujuan :

Peningkatan pelayanan jaringan komunikasi publik

Sasaran :

Terwujudnya pelayanan jaringan komunikasi publik

2. **Misi 2** : Melaksanakan pelayanan pengelolaan *E-Government* dalam menunjang pelayanan publik, percepatan implementasi SPBE, peningkatan kualitas data, pengawasan dan pelaporan data pemerintahan Kabupaten Tanah Laut

Tujuan :

Meningkatkan pelayanan pengelolaan *E-Government*

Sasaran :

Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan pelayanan pengelolaan *E-Government*

4. **Misi 3** : Melaksanakan pelayanan pengelolaan sumber daya statistik dan persandian lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Tujuan :

Peningkatkan pelayanan pengelolaan sumber daya statistik dan persandian

Sasaran :

Terwujudnya pelayanan pengelolaan sumber daya statistik dan persandian sebagai wadah informasi pembangunan daerah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.3 Program dan Kegiatan

Kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sementara Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 merupakan pelaksanaan operasional tahun pertama dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 dan disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019, berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2013-2018, program dan kegiatan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 dijabarkan menurut 3 (tiga) misi Dinas Komunikasi dan Informatika, dimana setiap misi dijabarkan melalui kebijakan dan program, Secara lebih rinci rumusan rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 dituangkan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH LAUT

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan								
0	0				-								
0	0	1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100 persen	1.002.143.850			100 persen	1.179.094.000
0	0	1	1		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah belanja jasa rekening listrik yang terbayar	Pelaihari	12 bulan	38.400.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		12 bulan	45.000.000
						Jumlah jasa surat kabar yang terbayar	Pelaihari	12 bulan					
						Jumlah belanja jasa TV Kabel yang terbayar	Pelaihari	12 bulan					
0	0	1	2		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terbayar	Pelaihari	12 bulan	35.397.720	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		12 bulan	39.330.800
0	0	1	3		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda 2	Pelaihari	5 unit	57.645.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun		5 unit	64.050.000

										Anggaran Sebelum ya			
						Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda 4	Pelaihari	2 unit				2 unit	
0	0	1	4		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolaan keuangan SKPD yang terbayarkan	Pelaihari	10 bulan	25.505.100	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		10 bulan	28.339.000
						Jumlah belanja materai yang terbayarkan	Pelaihari	12 bulan				12 bulan	
0	0	1	5		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terbayarkan	Pelaihari	12 bulan	4.150.260	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		12 bulan	4.611.400
0	0	1	6		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang terbayar	Pelaihari	18 unit	12.382.920	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		18 unit	13.758.800
0	0	1	7		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbayarkan	Pelaihari	12 bulan	15.166.800	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		12 bulan	16.852.000
0	0	1	8		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terbayarnya barang cetakan dan penggandaan	Pelaihari	1 tahun	6.502.500	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		1 tahun	7.225.000
0	0	1	9		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah belanja alat listrik dan elektronik yang terbayarkan	Pelaihari	12 bulan	21.229.200	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		12 bulan	23.588.000
						Jumlah spanduk/dekorasi/baliho yang terbayarkan	Pelaihari	30 buah				30 buah	

						Jumlah peralatan operasional persandian yang terbayarkan	Pelaihari	1 unit				1 unit	
						Jumlah belanja modal pengadaan UPS	Pelaihari	3 unit				3 unit	
0	0	1	10		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah belanja makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	Pelaihari	12 bulan	19.695.600	Lain-Lain Pendapat an Daerah Yang Sah		12 bulan	21.884.000
0	0	1	11		Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terbayarkan	Luar Kabupaten Tanah Laut	12 bulan	311.771.250	Lain-Lain Pendapat an Daerah Yang Sah		12 bulan	450.000.000
0	0	1	12		Rapat rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi di dalam daerah yang terbayarkan	Dalam Kabupaten Tanah Laut	12 bulan	91.417.500	Lain-Lain Pendapat an Daerah Yang Sah		12 bulan	101.575.000
0	0	1	14		Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Jumlah honorarium pegawai honorer / tidak tetap (PTT) yang terbayarkan	Pelaihari	12 bulan	362.880.000	Lain-Lain Pendapat an Daerah Yang Sah		12 bulan	362.880.000
0	0	2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			0	-	1 buah mobil dan 5 buah sepeda motor untuk operasional		395.000.000
0	0	2	1		Pengadaan kendaraan operasional	Jumlah kendaraan dinas roda empat untuk operasional yang tersedia			0	-	1 buah mobil dan 5 buah sepeda motor untuk operasional		395.000.000
						Jumlah kendaraan dinas roda dua untuk operasional yang tersedia							
0	0	5			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 persen	45.000.000			100 persen	100.000.000
0	0	5	1		Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah belanja kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal yang terbayarkan	Dalam dan Luar Daerah	10 orang	45.000.000	Lain-Lain Pendapat an Daerah Yang Sah	Diklat persandian dan diklat penunjang SDM lainnya	10 orang	100.000.000

0	0	6			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika		100 persen	5.724.720			100 persen	6.360.800
0	0	6	1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan bulanan yang tersusun	Pelaihari	12 dokumen	5.724.720	Lain-Lain Pendapat an Daerah Yang Sah	Dimasukkan dalam RPJMD dan Renstra Dinas Kominfo Kab. Tanah Laut	12 dokumen	6.360.800
						Jumlah laporan triwulan yang tersusun	Pelaihari	4 dokumen				4 dokumen	
						Jumlah laporan laporan akhir tahun yang tersusun	Pelaihari	1 dokumen				1 dokumen	
						Jumlah belanja modal harddisk eksternal untuk backup data laporan keuangan yang terbayarkan	Pelaihari	2 unit				2 unit	
1					Wajib								
1	6				Perencanaan Pembangunan								
1	6	15			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase SKPD yang terintegrasi dalam pusat data		100 persen	66.066.390			100 persen	150.000.000
1	6	15	1		Kegiatan penyusunan profile daerah	Jumlah laporan data statistik (Profil Hasil Pembangunan/Data Terpadu) Kabupaten Tanah Laut	Kabupaten Tanah Laut	1 dokumen	66.066.390	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		1 dokumen	150.000.000
1	20				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1	20	31			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase pemenuhan pengelolaan aset/laporan kinerja pengelolaan aset		100 persen	4.500.000			100 persen	5.000.000

1	20	31	1		Kegiatan penyusunan tabulasi data aset tetap	Jumlah laporan semester	Pelaihari	2 dokumen	4.500.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		2 dokumen	5.000.000
						Jumlah laporan triwulan	Pelaihari	4 dokumen				4 dokumen	
1	25				Komunikasi dan Informatika								
1	25	0			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Kominfo	Persentase pelayanan pengelolaan komunikasi publik		1 dokumen	37.867.500			1 buah	250.000.000
1	25	0	1		Kegiatan Pemeliharaan menara repeater bidang kominfo	Jumlah pemeliharaan Ijin frekuensi Radio komunikasi ke Kemenkominfo	Kabupaten Tanah Laut	2 buah	37.867.500	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2 buah	250.000.000
						Jumlah laporan pengawasan menara telekomunikasi	Kabupaten Tanah Laut	1 dokumen				1 dokumen	
1	25	15			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase SKPD yang terintegrasi dalam jaringan TIK, Persentase peningkatan pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi publik, Persentase SKPD dengan sistem data yang terintegrasi berbasis aplikasi		100 persen	903.789.900			100 persen	7.150.000.000
1	25	15	1		Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah Deseminasi informasi daerah melalui media online yang terdistribusi	Kabupaten Tanah Laut	480 informasi/berita	489.690.000	Lain-Lain Pendapatan	Rencana aksi Pemberantasan Korupsi untuk	480 informasi/berita	6.300.000.000

						Jumlah layanan internet dan layanan data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	Kabupaten Tanah Laut	12 bulan		Daerah Yang Sah	membangun pemerintahan yang bersih melalui teknologi informasi dan pelayanan berbasis jaringan (networking) sampai dengan kecamatan di Kabupaten Tanah Laut dan Penunjang Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	12 bulan	
						Jumlah kerjasama dengan instansi terkait tentang pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan teknologi	Kabupaten Tanah Laut	10 SKPD/in stansi				10 SKPD/insta nsi	
						Jumlah data jaringan infrastruktur TIK yang dikembangkan	Kabupaten Tanah Laut	12 bulan				12 bulan	
1	25	15	2		Kegiatan Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah peralatan penunjang operasional radio Tuntung Pandang	Kabupaten Tanah Laut	12 buah	342.814.500	Lain-Lain Pendapat an Daerah Yang Sah	Operasional Radio Tuntung Pandang dan Belanja modal perangkat pemancar radio untuk peningkatan kualitas Radio Tuntung Pandang		500.000.000
						Jumlah pemeliharaan antena pemancar radio Tuntung Pandang	Kabupaten Tanah Laut	12 bulan				12 bulan	
						Jumlah belanja modal pengadaan personal komputer untuk operasional radio Tuntung Pandang	Kabupaten Tanah Laut	2 unit					

						Jumlah belanja modal alat komunikasi untuk operasional siaran radio Tuntung Pandang	Kabupaten Tanah Laut	1 unit					
						Jumlah honorarium untuk Operasional LPPL Radio Tuntung Pandang	Kabupaten Tanah Laut	12 bulan				12 bulan	
1	25	15	3		Kegiatan penyusunan aplikasi sistem informasi	Jumlah Aplikasi Penunjang E-Government yang tersedia	Kabupaten Tanah Laut	2 aplikasi	71.285.400	Lain-Lain Pendapat an Daerah Yang Sah	Pemanfaatan E-Government untuk pelayanan publik, percepatan implementasi SPBE, Peningkatan kualitas data, Pengawasan dan pelaporan data pemerintahan Kabupaten Tanah Laut	2 aplikasi	350.000.000
						Jumlah belanja modal pengadaan sistem operasi client yang tersedia	Kabupaten Tanah Laut	6 unit				6 unit	
						Jumlah belanja modal pengadaan sistem operasi server yang tersedia	Kabupaten Tanah Laut	1 unit				1 unit	
1	25	15	4		Inventarisasi data informasi				0	-			0
1	25	15	6		Kegiatan perencanaan dan pengembangan kebijakan persandian pendukung keamanan dan telekomunikasi daerah	Terlaksananya sosialisasi tentang pengamanan informasi dan informasi menggunakan persandian pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		-	0	-		-	0
1	25	18			Program Kerjasama Infomsi dan Media Massa	Persentase pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam pengelolaan informasi		100 persen	186.601.500			100 persen	300.000.000
1	25	18	1		Kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah informasi pembangunan daerah			0				0
1	25	18	2		Kegiatan keikutsertaan pameran	Jumlah keikutsertaan dalam pameran pembangunan daerah			0	-			0
1	25	18	3		Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan	Jumlah Tim PPID yang terbentuk	Pelaihari	1 tim	186.601.500	Sisa Lebih	Pembinaan dan pemberdayaan	1 tim	300.000.000

					bagi masyarakat					Perhitung an Anggaran Tahun Anggaran Sebelumn ya	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)		
						Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina (aktif)	Kabupaten Tanah Laut	11 KIM				11 KIM	
						Jumlah Kegiatan Sosialisasi KIM yang terlaksana	Kabupaten Tanah Laut	1 kegiatan				1 kegiatan	
						Jumlah majalah kominfo untuk penyebarluasan informasi daerah yang tercetak	Kabupaten Tanah Laut	1 majalah				1 majalah	
						Jumlah pameran yang diikuti	Kabupaten Tanah Laut	1 kegiatan				1 kegiatan	
1	25	18	4		Penyediaan dan pengembangan media informasi	Jumlah media informasi yang dikelola oleh pemerintah daerah			0	-			0
1	25	18	5		Kegiatan penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga yang terkait di bidang persandian, keamanan informasi dan telekomunikasi	Jumlah kerjasama dengan instansi terkait bidang persandian dalam pengamanan informasi dan telekomunikasi			0	-			0
-	-	-	-		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi		100 persen	0			100 persen	175.000.000
-	-	-	-		Penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah	Jumlah sosialisasi tentang kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah	Kabupaten Tanah laut	1 sosialisasi Persandian	0	-	Sarana dan prasarana pendukung persandian, keamanan informasi dan telekomunikasi pemerintah daerah	1 perangkat penunjang persandian	175.000.000
						TOTAL			2.251.693.860				9.710.454.800

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Diskominfo Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 disusun sebagai pelaksanaan tahun terakhir dari Renstra Diskominfo Tahun 2018-2023. Renja Diskominfo berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan Diskominfo Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.

Renja Diskominfo Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 diharapkan dapat memberikan umpan balik yang positif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Diskominfo Kabupaten Tanah Laut sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah terhadap upaya pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada masyarakat melalui peningkatan keterlibatan para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mewujudkan Good Governance.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Diskominfo Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Diskominfo.

Diharapkan semua elemen kelembagaan Diskominfo dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pelaihari, Juli 2018
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut,



Dra. Hj. INDAH HERLINA
NIP. 19671004 199010 2 002